

BAB III

PATA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL NON-PEMERINTAHAN

Organisasi internasional atau organisasi non-pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara adalah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional.

Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan di-organisirnya masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata antar negara. Organisasi internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.¹

A. Sejarah Terbentuknya PATA (*Pacific Asian Travel Association*)

PATA (*Pacific Asian Travel Association*) merupakan sebuah organisasi regional bidang pariwisata di wilayah Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1952 di Honolulu Hawaii dan merupakan organisasi non-profit (nirlaba). Maksud atau tujuan PATA adalah untuk mengembangkan, memajukan dan memberikan fasilitas kepariwisataan di daerah wilayah lautan Pasifik. PATA memiliki kerjasama yang luas sehingga membantu negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Organisasi PATA berkedudukan di kantor pusatnya di Grant Ave, San Francisco, California Amerika Serikat. PATA dibentuk atas ide Lorrin P. Thurston dan William J. Mullahey. PATA (*Pacific Asia Travel Association*) merupakan NGO yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan, memajukan, dan memberikan fasilitas kepariwisataan daerah wilayah Lautan Pasifik. Pada tanggal 10-15 Januari 1952 diselenggarakan sebuah konferensi perdana bersama dengan 12 perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik yang diadakan di Honolulu dan menghasilkan sebuah keputusan dimana para peserta sepakat untuk menggunakan *Pacific Interim Travel Association* (PITA). Pada konferensi yang kedua kemudian diadakan pergantian nama *Pacific Interim Travel Association* (PITA) berubah menjadi *Pacific Asia Travel Association* (PATA).

PATA memiliki kerjasama yang semakin meluas sehingga PATA turut serta membantu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia. Pada tahun 1998,

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, PT Alumnus, 2005, hal 52

kantor pusat PATA dipindahkan ke Bangkok, Thailand. Kepengurusan PATA terdiri dari perwakilan setiap negara-negara di Asia Pasifik yang terbagi atas beberapa divisi PATA yaitu PATA Americas Division, PATA Asia Division dan PATA South Asia Division. Bali bekerjasama dengan PATA melalui PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter.

Saat ini PATA (Pasific Asia Travel Association) sudah bekerja sama dengan hampir seratus badan pariwisata pemerintah, lebih dari lima maskapai penerbangan dan jalur pelayaran. Organ PATA yang penting terdiri dari konferensi tahunan, komite eksekutif, direktur eksekutif yang diangkat oleh komite eksekutif. Dalam konferensi PATA pada tahun 2007 di Indonesia diharapkan bahwa PATA memulihkan keadaan Bali di dunia internasional.

PATA aktif mengembangkan penelitian dan peninjauan pariwisata untuk wilayah Asia Pasifik dan menyediakan informasi yang luas tentang kepariwisataan di wilayah ini. Penerbitan yang terkenal dari PATA adalah Pacific Travel News, Pacific Area Travel Handbook, Pacific Hotel Directory and Travel Guide, dan lain-lain.

Organ PATA yang penting terdiri dari konferensi tahunan, komite eksekutif, direktur eksekutif yang diangkat oleh komite eksekutif. Sedangkan organ PATA yang lain yaitu, komite fungsional yang terdiri dari advertensi, anggaran keuangan, rencana konferensi, hubungan fasilitas dengan IUOTO, publisitas dan promosi, penelitian dan peninjauan, majalah Pacific Travel News, fasilitas, Visitor Plant Development, dan workshop.

Walaupun dalam tubuh asosiasi tergabung organisasi-organisasi yang hampir seluruhnya saling bersaing, namun terdapat satu konsensus bahwa tugas utama setiap anggota adalah memperbesar jumlah kunjungan wisatawan ke Asia Pasifik dan Amerika Utara yang dengan sendirinya berarti meningkatkan tourism revenue setiap anggota. Untuk menjamin komunikasi yang efektif dengan kantor pusat dalam melaksanakan tugasnya, di Negara-negara anggota PATA dibentuk suatu badan yang dinamakan PATA CHAPTER. PATA CHAPTER terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Promotion Chapter, yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan penerangan dan promosi pariwisata
- 2) Regional Chapter, yang bertujuan memajukan kepentingan bersama di daerah tujuan wisata tertentu di kawasan Pasifik.

B. Tujuan dan Fungsi PATA

PATA bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan kepada para anggotanya, dengan misinya memberikan andil pada pertumbuhan nilai dan kualitas berdasarkan pengalaman dari kepariwisataan di lingkungan Negara Asia Pasifik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PATA antara lain:

- a) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan
- b) Pemutakhiran data menyangkut kecenderungan industri pariwisata
- c) Pelayanan jasa pemberian sarana secara profesional dan perencanaan pembentukan suatu tugas (Task Force)
- d) Program Kepemimpinan dan program yang berkaitan dengan konservasi alam dan budaya
- e) Bantuan pengembangan pariwisata dan penyusunan kebijaksanaan penanaman modal

- f) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, promosi dan upaya penjualan
- g) Memperluas peluang mencari pasar baru
- h) Menyelenggarakan forum sebagai wahana pertemuan pemuka-pemuka pariwisata di negara-negara Asia-Pasifik.

Peran PATA adalah berusaha mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada pada negara anggotanya. Artinya PATA diharapkan dapat berperan aktif untuk memajukan kepariwisataan anggotanya. Pada konteks ini, PATA sesuai dengan fungsi dan peranannya, mempunyai tanggung jawab dalam memajukan pariwisata dengan negara-negara yang menjalin kerja sama dengannya. Artinya tanggung jawab PATA adalah membantu anggotanya untuk memajukan potensi pariwisata yang dimilikinya.

Misi atau fungsi dari PATA adalah untuk meningkatkan pertumbuhan, nilai dan kualitas wisatawan. Masyarakat internasional berharap adanya PATA dapat membuat keadaan pariwisata yang ada menjadi lebih lebih dikenal dan maju. PATA berusaha memajukan pariwisata. PATA menangani penerbangan dan perkapalan, hotel, operator pariwisata, agensi perjalanan, universitas, institusi keuangan dan berbagai pihak lain yang berkaitan. Negara anggota menggunakan PATA untuk membantu mereka menarik pasaran baru, mengembangkan pariwisata, serta membina hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Keberadaan organisasi PATA bagi masyarakat Internasional sangat diperlukan mengingat banyaknya potensi wisata yang dimiliki setiap negara.

C. Keberadaan PATA Dalam Kepariwisata Indonesia

Indonesia telah bekerjasama dengan PATA melalui Asia Division sejak tahun 1975. PATA melibatkan pemerintah dan memiliki kesepakatan untuk mendukung segala bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak PATA. Dalam menangani sektor pariwisata yang ada di Indonesia, tidak hanya PATA Indonesia Chapter saja yang berperan. Badan perwakilan PATA Chapter juga dibentuk di Bali yang bernama PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter dengan tujuan untuk mendukung misi PATA mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Bali.

PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter memiliki kerjasama dengan organisasi pariwisata lainnya yang bergabung dalam Bali Tourism Board. Bali Tourism Board merupakan badan organisasi yang terdiri dari sembilan badan organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan seperti PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia), ASITA (Association of Indonesian Travel Agent), PATA (Pacific Asia Travel Association), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), Pawiba (Persatuan Angkutan Wisata Bali), Gahawisri (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari), SIPCO (Society of Indonesian Professional Conference Organiser), Putri (Perkumpulan Atraksi Pariwisata) dan Bali Village (Asosiasi Promosi Pariwisata). Indonesia juga menjalin kerjasama dengan PATA salah satunya adalah kerjasama PATA dengan yayasan keterampilan hospitality di restoran dan hotel. Selain itu PATA Indonesia di tahun 2003 mempromosikan Jakarta sebagai golf destination. Pada tahun 2002 bersama badan pengembangan pariwisata PATA membuat festival wisata 2002.

Harapan lingkungan dengan adanya organisasi PATA adalah PATA dapat membangun building network di dalam dunia pariwisata semakin besar dengan banyaknya anggota PATA di 42 negara di dunia. PATA juga diharapkan melakukan “branding image” untuk memulihkan citra pariwisata seluruh anggotanya, branding tersebut dilakukan PATA dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya. Dengan cara mengadakan PATA Travel Mart (PTM) di Negara yang dipilih oleh para pejabat PATA.

Branding image ditujukan bagi para pelaku pariwisata yang belum mengenal salah satu negara peserta anggota PATA, dengan dilakukannya “branding image” PATA mengharapkan anggota PATA dapat yakin suatu negara tersebut adalah member PATA. Dengan “branding image” membuat dunia internasional semakin yakin bahwa negara sudah di melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang mempunyai kapabilitas, mumpuni, “reputable”, terpercaya yaitu PATA. Itu langkah langkah yang diharapkan diikuti oleh daerah daerah dan destinasi destinasi yang belum berkembang di negara tersebut².

PATA juga mengadakan program program training. PATA Academic, PATA Adventure, PATA Summit. PATA Summit adalah program PATA yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan, melalui digital online. Program ini terus dilakukan oleh PATA secara berkesinambungan dan dilakukan bergiliran di setiap negara anggota PATA.

D. PATA Sebagai Organisasi Internasional non-Pemerintahan di Bidang Pariwisata

1) Organisasi Internasional Dalam Kajian Hubungan Internasional

Sejarah dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai kelingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain.

Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan peraturan. Untuk mengatur agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional. Timbulnya hubungan internasional secara umum, pada hakikatnya merupakan proses hubungan antar negara. Dengan membentuk organisasi, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan menyangkut bidang kehidupan yang luas. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata antar negara.

² Wawancara dengan Poernomo Siswoprasetyo, CEO/President PATA Indonesia Chapter

Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antar mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional. Namun himbuan bagi pembentukan hubungan internasional yang distrukturkan dalam suatu organisasi selama beberapa abad hanya terbatas pada doktrin dan propaganda belaka. Para pemimpin negara tetap menganggap bahwa pembentukan organisasi-organisasi seperti itu tidak sesuai dengan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara.

Dalam pelaksanaannya, gagasan untuk mendirikan organisasi seperti itu tidak sesuai dengan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, gagasan untuk mendirikan organisasi internasional hanya terbatas pada perbaikan prosedur-prosedur tradisional antar negara. Akhirnya upaya pembentukan organisasi-organisasi internasional yang sebenarnya baru mulai pada abad ke-17 dan 18 melalui berbagai proyek. Pada abad ke-17 misalnya muncul gagasan Emeric de Cruce pada tahun 1623.

Kemudian pada abad ke-18 muncul proyek-proyek William Penn, Bentham, JeanJacques Rousseau, Abe de Saint-Pierre dalam plan for Perpetual Peace mengusulkan pembentukan suatu majelis umum untuk menyelesaikan semua sengketa dengan mayoritas $\frac{3}{4}$ suara beserta sanksi kolektif termasuk penggunaan senjata. Abbe de Saint-Pierre juga berpendapat bahwa majelis umum bukan saja berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, tapi juga untuk membuka kerjasama antar negara di berbagai bidang dengan mendirikan perwakilan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut. Dengan kemajuan teknik dan kesalingtergantungan ekonomi yang mulai dirasakan di abad ke-19, dianggap perlu untuk mengembangkan kerjasama internasional. Mulai bagian kedua abad ke-19 sampai tahun 1914, Eropa mengalami periode panjang cukup damai yang disertai kemajuan teknik sarana komunikasi, dan keadaan ini telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi internasional.

Disamping pembentukan organisasi-organisasi internasional, pada waktu yang sama juga berkembang organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs). Menurut Union of International Associations, disamping perkembangan cepat organisasi internasional yang berjumlah 7 pada tahun 1870-an dan menjadi 37 di tahun 1909, perkembangan NGOs lebih cepat lagi yaitu mencapai jumlah 176 pada waktu yang sama. Yang pertama adalah organisasi-organisasi yang lahir pada abad ke-19, antara lain Komite Internasional untuk Sungai Elbe tahun 1821, untuk Sungai Rhine tahun 1831 dan pembentukan European Danube Commission tahun 1856 untuk mengawasi pelayaran bebas di atas sungai tersebut yang lepas dari pengawan nasional masing-masing negara.

Selanjutnya gagasan untuk menghimpun sejumlah ahli dan administrator yang melaksanakan tugas-tugas khusus atas nama negara-negara telah pula dapat diwujudkan dalam pendirian International Telecommunication Union (ITU) dan pembentukan General

Postal Union tahun 1874 yang kemudian menjadi Universal Postal Union (UPU). Tidak lama kemudian didirikan pula International Bureau of Weights and Measures tahun 1875 dan Inter-Union for Publication of Customs Tariff tahun 1890.

Organisasi non-pemerintah yang sangat terkenal pada permulaan abad ke-20 dan yang mengembangkan Konvensi Jenewa 1864, 1906, 1929 adalah International Committee of the Red Cross. Selanjutnya malapetaka yang menimpa dunia selama Perang Dunia I telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk suatu organisasi internasional dengan kekuasaan lebih tinggi dari yang dimiliki negara-negara yaitu Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Dengan lahirnya LBB ini dimulailah generasi kedua organisasi-organisasi internasional.

Pada periode menjelang Perang Dunia II, selain LBB antara lain juga lahir Organisasi Buruh Sedunia (ILO) tahun 1919, Organisasi Penerbangan Internasional tahun 1919 dan juga Mahkamah Tetap Internasional (PCIJ) tahun 1920. Berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1945 juga mengakhiri kehidupan LBB yang telah gagal mencegah perang. Disamping itu, Perang Dunia II telah membangkitkan lagi kesadaran atas keharusan mutlak kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya kembali perang dunia dengan menciptakan kondisi yang baik bagi kerjasama antar negara. Dengan berakhirnya Perang Dunia II maka mulai pula generasi ke-3 organisasi internasional, yaitu dengan lahirnya PBB. Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhatihatian, karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik di tingkat teori maupun praktis.

Pengertian Definisi universal dari organisasi internasional sangat sulit untuk didefinisikan. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organizations-IGO's) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations-NGO's).

Setiap Negara yang membangun dan mengembangkan kepariwisataan memerlukan organisasi atau wadah yang dapat berfungsi membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional, maupun internasional, dalam bentuk organisasi pemerintah, semi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam pembentukan organisasi kepariwisataan diperlukan suatu kebijakan atau aturan yang mendasarinya, sehingga dapat diakui secara nasional dan dapat melakukan kegiatan kerjasama secara nasional maupun internasional.

Di dalam organisasi yang bersifat internasional, diharapkan adanya kerjasama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing negara terutama dalam bidang kepariwisataan. Untuk itu, setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, regional maupun nasional. Disamping itu, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara secara bilateral atau multilateral, yang bertujuan memperbesar jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar arus wisatawan.

Dalam suatu organisasi kepariwisataan terbagi tiga bagian penting menurut tingkatannya antara lain organisasi kepariwisataan nasional, regional dan internasional. Organisasi Kepariwisata Nasional antara lain: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia (IJUMPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Hotel Human Resource Managers Association (HHRMA) dan Himpunan Penulis Pariwisata (HPP).

Sedangkan Organisasi Kepariwisata Regional juga terbentuk antara lain: Asean Tourism Association (ASEANTA), Asian Association of Conservation and Visitors Bureans (AACVB), ASEAN Permanent Committee on Tourism (ASEAN PCT) dan ASEAN Hotel and Restaurant Association (AHRA). Selain itu juga terdapat Organisasi Kepariwisata Sub-Regional, antara lain Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle/IMT-GT), Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Indonesia, Malaysia and Singapore Growth Triangle/IMGS-GT) dan Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia Malaysia, Filipina (Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines – East ASEAN Growth Area/BIMP-EAGE).

Tingkatan tertinggi suatu organisasi pariwisata adalah Organisasi Kepariwisata Internasional yang terdiri dari: WTO (Worlds Tourism Organization), Pacific Asia Travel Association (PATA), International Congress and Convention Association (ICCA), Universal Federation of Travel Agent Association (UFTAA) dan Internasional AIR Transport Association (IATA).

2) PATA Dalam kajian Hubungan Internasional

PATA adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dibidang pariwisata. PATA termasuk NGO karena anggota PATA adalah kelompok-kelompok swasta bukan para delegasi resmi negara-negara. Bukti dari PATA sebagai organisasi internasional non pemerintah adalah pengelolaan organisasi PATA yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

PATA adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dibidang pariwisata di wilayah Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1951 di Honolulu, Hawaii. Organisasi PATA berkedudukan di kantor pusatnya di Grant Ave, San Fransisco, California Amerika Serikat. PATA dibentuk atas ide Lorrin P. Thurston dan William J. Mullahey. PATA merupakan NGO yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan, memajukan, dan memberikan fasilitas kepariwisataan daerah Lautan Pasifik. Pada tanggal 10-15 januari 1952 diselenggarakan sebuah konferensi perdana bersama dengan 12 perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik yang diadakan di Honolulu dan menghasilkan sebuah keputusan dimana para peserta sepakat untuk menggunakan Pacific Interm Travel Association (PITA). Pada konferensi yang kedua kemudian diadakan pergantian nama yang

semula Pacific Intern Travel Association (PITA) menjadi Pacific Area Travel Association (PATA).

PATA memiliki kerjasama yang semakin meluas sehingga PATA turut serta membantu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia. Pada tahun 1998, kantor pusat PATA dipindahkan ke Bangkok, Thailand.

Kepengurusan PATA terdiri dari perwakilan setiap negara-negara di Asia Pasifik yang terbagi atas beberapa divisi PATA yaitu PATA Americas Division, PATA Asia Division dan PATA South Asia Division. Indonesia khususnya Bali bekerjasama dengan PATA melalui PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter.

Saat ini PATA sudah bekerjasama dengan hampir seratus badan pariwisata pemerintah, lebih dari lima maskapai penerbangan dan jalur pelayaran. Organ PATA yang penting terdiri dari konferensi tahunan, komite eksekutif, direktur eksekutif yang diangkat oleh komite eksekutif. Dalam konferensi PATA pada tahun 2007 di Indonesia diharapkan bahwa PATA memulihkan keadaan Bali di dunia internasional.

PATA menjadi mediasi bagi Bali untuk kembali mempromosikan pariwisatanya ke dunia internasional. Dengan menyediakan berbagai macam informasi yang luas mengenai bidang kepariwisataan terhadap negara-negara sehingga dengan mudah negara-negara yang membaca informasi pariwisata khususnya Bali dapat mengetahui perkembangan Bali secara detail. Ada beberapa penerbitan yang cukup terkenal dalam PATA seperti Pacific Area Travel Handbook, Pacific Travel News, dan lain-lain. Melalui penerbitan tersebut PATA mempromosikan keadaan suatu wisata terhadap masyarakat sehingga semakin banyak yang mengenal wisata daerah tersebut.

Selain itu, kerjasama melalui PATA tidak hanya terbatas pada tingkat operasional, tetapi dalam hal perencanaan, pengembangan dan pelatihan atau training. PATA menjadi katalisator yang tepat karena mengingat bahwa pengunjung yang berkunjung ke Bali bukan lagi berasal dari negara-negara Eropa seperti dulu, melainkan juga wisatawan dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Cina, dan juga Australia. Secara bertahap, kerjasama yang dilakukan antara PATA dengan Bali selama beberapa tahun mulai menunjukkan kemajuan.

Kerjasama yang dilakukan oleh PATA dengan Bali selama beberapa tahun mulai menunjukkan kemajuan. Hubungan antara PATA dan pihak-pihak yang terkait dengan kepariwisataan dengan membuat program promo paket wisata ke Bali sangat membantu untuk memperbaiki kondisi pariwisata Bali. Tiket promo pesawat yang dikeluarkan sebagai jalan untuk menarik pengunjung telah berhasil membuat banyak wisatawan tertarik untuk datang ke Bali.